

Bela Negara

dalam Praktik

Syarif Imam Hidayat

Putu Anggi Suryantari

Moh Rifqi ZamZami

Nur Irvan Rizqi

M. Nur Hidayatulloh

Rangga Laksana Aryananda



PT GHANI PRESS GROUP

Bela Negara dalam Praktik

Penulis:

Syarif Imam Hidayat, Putu Anggi Suryantari, Moh Rifqi ZamZami, Nur Irvan Rizqi, M. Nur Hidayatulloh, Rangga Laksana Aryananda

Desain Cover:

Rizki Baehtiar Afandi

Layouter:

Emi Lailiyah Safitri

Editor Naskah:

Umar Khasan

14 x 21 cm, v-116

ISBN: 978-634-04-7162-5

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP

Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 28 Tanjung, Lamongan

HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2025 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku Ragam Bela Negara ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini menjadi dasar semangat untuk memperluas pemahaman bahwa bela negara bukan sekadar kewajiban militer, melainkan sebuah panggilan pengabdian dari seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks perkembangan bangsa yang semakin kompleks, nilai-nilai bela negara cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara menjadi landasan penting bagi setiap individu untuk berkontribusi secara positif.

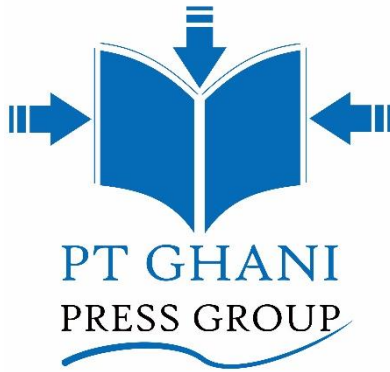
Kami berharap buku ini memberikan pemahaman kepada masyarakat luas untuk melihat bahwa dedikasi profesional, integritas, dan inovasi adalah bentuk nyata bela negara di era modern. Selain itu memberikan manfaat dan menumbuhkan kesadaran bahwa pembangunan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang diwujudkan dalam setiap langkah pengabdian.

Surabaya, Januari 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
BAB 2	
BELA NEGARA	7
BAB 3	
PENDIDIKAN DALAM BELA NEGARA	23
BAB 4	
TEKNOLOGI DALAM BELA NEGARA	37
BAB 5	
KESEHATAN DALAM BELA NEGARA	73
BAB 6	
SIKAP BELA NEGARA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	87
DAFTAR ISI	109
BIODATA PENULIS	113



PT GHANI PRESS GROUP

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

BAB 1

PENDAHULUAN

“Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga merupakan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan peran dan profesinya masing-masing.”

Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, tantangan terhadap keutuhan dan kedaulatan negara semakin kompleks. Ancaman tidak hanya bersifat militer, tetapi juga nonmiliter, seperti lunturnya nilai-nilai kebangsaan, radikalisme, disintegrasi bangsa, serta pengaruh budaya asing yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan bela negara menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui penanaman nilai-nilai bela negara, diharapkan setiap warga negara mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, bela negara menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Pancasila.

Bela negara merupakan konsep fundamental yang berangkat dari kesadaran bahwa kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat (Alhudawi, 2021). Konsep ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam

menjaga keberlangsungan negara sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing.

Secara konstitusional, kewajiban bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sedangkan Pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Siringoringo, 2022). Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara tanpa terkecuali (Satresna, 2023). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempatkan perguruan tinggi beserta sivitas akademika sebagai aktor strategis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan penguatan sumber daya manusia (Daria, 2022).

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, bela negara memiliki kedudukan yang strategis sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bela negara bukan hanya konsep normatif, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa perubahan signifikan terhadap bentuk ancaman yang dihadapi bangsa. Tantangan terhadap nilai kebangsaan tidak lagi terbatas pada ancaman militer, tetapi juga mencakup ancaman nonmiliter yang bersifat ideologis, sosial, budaya, dan informasi (Yunita, 2023). Arus informasi yang cepat dan masif melalui internet serta media sosial berpotensi mempengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap identitas nasional. Fenomena seperti penyebaran hoaks, radikalisme, intoleransi, serta lunturnya nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa ketahanan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh ketahanan karakter dan kesadaran kebangsaan.

Dalam konteks tersebut, bela negara di era modern perlu dimaknai secara lebih luas dan adaptif. Bela negara tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kesiapan untuk mengangkat senjata, melainkan sebagai upaya mempertahankan jati diri bangsa, menjaga persatuan sosial, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Pemahaman ini menempatkan bela negara sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tanggung jawab warga negara.

BAB 2

BELA NEGARA

➤ DEFINISI

Secara etimologis, bela negara berasal dari kata bela yang berarti mempertahankan atau melindungi, dan negara yang berarti kesatuan organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan dan wilayah tertentu (Puspitasari, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Konsep bela negara tidak hanya menekankan aspek militer, tetapi juga mencakup kontribusi nonmiliter melalui bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi. Bela negara di era modern diartikan sebagai partisipasi aktif setiap warga negara dalam mempertahankan ideologi, identitas, serta integritas bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks (Nurdin et al., 2024).

Pemaknaan bela negara yang bersifat luas ini menunjukkan bahwa bela negara merupakan sikap dan perilaku yang melekat dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Bela negara tidak berdiri sebagai aktivitas insidental, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, bela negara menjadi bagian dari etika kewarganegaraan yang menuntut kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen kolektif.

Dalam perspektif pertahanan semesta, bela negara menempatkan rakyat sebagai subjek utama pertahanan nasional. Negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya yang dibangun oleh masyarakat.

Ketahanan tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu, keberhasilan bela negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan kesadaran kebangsaan warga negara.

Selain itu, bela negara juga berkaitan erat dengan upaya menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Warga negara yang memiliki kesadaran bela negara akan berperan aktif dalam menciptakan stabilitas sosial, mendukung kebijakan publik, serta berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan bidang dan profesinya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa bela negara tidak terpisah dari proses pembangunan, melainkan menjadi bagian integral dalam mewujudkan bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing.

Dengan memahami definisi dan ruang lingkup bela negara secara komprehensif, dapat dipahami bahwa bela negara merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut partisipasi aktif seluruh warga negara. Konsep ini menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Secara konseptual, bela negara mencakup upaya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun nonmiliter. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta teknologi informasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

➤ **Sejarah dan Perkembangan Konsep Bela Negara**

Konsep bela negara telah ada sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa tersebut, bela negara diwujudkan melalui perjuangan fisik melawan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, konsep bela negara mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi zaman.

Pada era modern, bela negara tidak lagi terbatas pada perang fisik, tetapi lebih menekankan pada peran aktif warga negara dalam menjaga persatuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempertahankan nilai-nilai ke-bangsaan di tengah arus globalisasi.

➤ **Tujuan Bela Negara**

Tujuan bela negara adalah mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Selain itu, bela negara bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta rela berkorban demi kepentingan nasional.

➤ **Manfaat Bela Negara**

Manfaat bela negara antara lain memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, serta menciptakan masyarakat yang disiplin dan bertanggung jawab. Bela negara juga berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis dan berakhlak mulia.

➤ **Nilai-Nilai Dasar Bela Negara**

Nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan bela negara.

➤ **Bentuk-Bentuk Bela Negara**

Bentuk bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

- a. Bidang pendidikan, dengan belajar sungguh-sungguh dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Bidang sosial, dengan menjaga kerukunan dan toleransi antarwarga.
- c. Bidang ekonomi, dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
- d. Bidang politik, dengan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.
- e. Bidang pertahanan dan keamanan, dengan mengikuti pelatihan atau komponen cadangan bila diperlukan.

➤ **Bela Negara di Era Globalisasi**

Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bela negara di era globalisasi menuntut warga negara untuk mampu menyaring pengaruh budaya asing, menjaga identitas nasional, serta memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

➤ **Peran Generasi Muda dalam Bela Negara**

Generasi muda memiliki peran strategis dalam bela negara karena merupakan penerus bangsa. Peran tersebut antara lain menjaga persatuan, menghindari perilaku menyimpang, berprestasi di berbagai bidang, serta aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

➤ **Tantangan dalam Pelaksanaan Bela Negara**

Pelaksanaan bela negara menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran nasionalisme, pengaruh paham radikalisme, serta penyalahgunaan

teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan tersebut.

➤ **Implementasi Bela Negara dalam Kehidupan Sehari-hari**

Implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menaati hukum, menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

Bela negara merupakan salah satu unsur penting dalam ketahanan nasional. Dengan meningkatnya kesadaran bela negara, maka daya tahan bangsa terhadap berbagai ancaman akan semakin kuat. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi dasar utama dalam pelaksanaan bela negara. Setiap nilai dalam Pancasila mencerminkan semangat bela negara yang harus diamalkan oleh seluruh warga negara.

➤ **Bela Negara dan Hak Asasi Manusia**

Pelaksanaan bela negara harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bela negara bukanlah paksaan, melainkan kesadaran dan tanggung jawab moral sebagai warga negara.

Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, memberikan pendidikan dan pelatihan, serta menciptakan kondisi yang mendukung tumbuhnya kesadaran bela negara di masyarakat. Masyarakat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis sebagai wujud nyata bela negara. Perkembangan teknologi menuntut bentuk bela negara yang baru, seperti menjaga keamanan siber, melawan hoaks, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Contoh implementasi bela negara dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, kegiatan gotong royong, serta kontribusi dalam pembangunan nasional. Di masa depan, bela negara akan semakin relevan seiring dengan kompleksitas ancaman yang dihadapi bangsa. Oleh karena itu,

penanaman nilai-nilai bela negara harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

➤ **Dasar Hukum Bela Negara**

Landasan yuridis bela negara di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Ketentuan hukum ini menjadi dasar konstitusional bagi keterlibatan masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3)

Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip kesetaraan warga negara dalam tanggung jawab kebangsaan. Bela negara tidak dibedakan berdasarkan latar belakang sosial, profesi, maupun status ekonomi, melainkan menjadi kewajiban universal yang melekat pada status kewarganegaraan.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (1)

Pasal ini menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Makna pertahanan dan keamanan dalam pasal ini tidak terbatas pada aspek militer, tetapi mencakup peran masyarakat dalam menciptakan stabilitas nasional, ketertiban sosial, serta ketahanan bangsa secara menyeluruh. Ketentuan ini menjadi dasar bagi konsep sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang ini secara lebih rinci mengatur penyelenggaraan pertahanan negara dan menempatkan bela negara sebagai tanggung jawab seluruh warga negara. Dalam undang-undang tersebut, bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan

bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, serta kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Pengaturan ini menegaskan bahwa bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, pengabdian sesuai profesi, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara keseluruhan, dasar hukum bela negara menunjukkan bahwa konsep ini memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dan bersifat mengikat. Keberadaan landasan hukum tersebut memberikan arah dan kepastian bagi pelaksanaan bela negara, sekaligus menegaskan bahwa pembelaan terhadap negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi merupakan kewajiban bersama seluruh warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

➤ **Membangun Kesadaran Bela Negara**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan tersebut berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.

Pencapaian tujuan nasional tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya pembangunan di seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya paling mendasar dalam proses tersebut adalah membangun kesadaran bela negara di kalangan warga negara. Kesadaran ini menjadi fondasi utama agar setiap individu memiliki pemahaman yang utuh mengenai peran, hak, dan kewajibannya dalam menjaga keberlangsungan negara.

Membangun kesadaran bela negara tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Pendidikan kesadaran bela negara berperan penting dalam menanamkan nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, serta sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, warga negara diharapkan mampu memahami bahwa bela negara bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Di sisi lain, motivasi untuk membela negara dapat tumbuh dari kesadaran individual bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan suatu kehormatan. Banyak warga negara bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi kepentingan bersama karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap negara. Pengorbanan tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui kontribusi intelektual, profesional, dan sosial sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Namun demikian, agar pelaksanaan bela negara berjalan secara adil dan terarah, diperlukan kepastian hukum yang mengaturnya. Pengaturan bela negara dalam peraturan perundang-undangan memberikan kejelasan mengenai bentuk, mekanisme, serta batasan hak dan kewajiban warga negara. Dengan adanya kepastian hukum, warga negara dapat melaksanakan bela negara secara bertanggung jawab dan proporsional, tanpa mengabaikan hak-hak dasarnya.

Dengan demikian, membangun kesadaran bela negara merupakan proses yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Kesadaran tersebut tidak hanya dibentuk melalui pendekatan normatif, tetapi juga melalui keteladanan, pendidikan, dan sistem hukum yang mendukung. Kesadaran bela negara yang kuat akan melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kebangsaan, siap berkontribusi dalam pembangunan, serta mampu menjaga persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 3

PENDIDIKAN DALAM BELA NEGARA

“Bela negara pada hakikatnya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab institusi militer, melainkan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. Dalam konteks pendidikan, bela negara diwujudkan melalui upaya sistematis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama dalam pembangunan bangsa.”

Dalam profesi pendidik, baik guru maupun dosen, semangat bela negara tercermin melalui pengabdian intelektual dan moral dalam proses pendidikan. Pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, penanam nilai, serta teladan dalam sikap dan perilaku. Melalui peran tersebut, pendidikan menjadi sarana strategis untuk menumbuhkan nasionalisme, etika akademik, dan tanggung jawab sosial pada peserta didik.

➤ **Peran Pendidikan dalam mewujudkan Bela Negara**

Dalam konteks bela negara, pendidikan memiliki peran langsung dalam pembentukan karakter bangsa, penguatan ideologi Pancasila, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Pendidikan menjadi media utama untuk menanamkan kesadaran kebangsaan sejak dini dan membangun pola pikir kritis yang tetap berlandaskan nilai-nilai nasional.

Pendidikan dan Pengajaran

Dalam proses pembelajaran, guru dan dosen berperan sebagai teladan moral dan intelektual bagi siswa maupun mahasiswa. Sikap profesional, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh pendidik menjadi contoh konkret nilai bela negara dalam praktik sehari-hari. Melalui pendekatan pendidikan karakter, pendidik dapat menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, toleransi, kerja keras, serta kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Materi pembelajaran juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran bela negara. Integrasi isu-isu kebangsaan, etika profesi, dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum membantu peserta didik memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat netral, melainkan memiliki dimensi sosial dan kebangsaan. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk menyadari bahwa keilmuan yang dipelajari tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemajuan bangsa dan negara.

Selain itu, metode pembelajaran yang mendorong diskusi kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah turut membentuk sikap demokratis dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari bela negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian dan Inovasi Ilmiah

Penelitian dan inovasi ilmiah merupakan wujud bela negara dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kegiatan penelitian, pendidik berkontribusi dalam menghasilkan pengetahuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan nasional. Penelitian yang berorientasi pada kebutuhan strategis bangsa, seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan, lingkungan, serta teknologi digital, memiliki peran penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk dan teknologi asing.

Selain aspek substansi, integritas dalam penelitian juga menjadi bagian dari bela negara. Publikasi ilmiah yang menjunjung tinggi etika akademik, kejujuran ilmiah, dan orisinalitas mencerminkan tanggung jawab moral pendidik dalam menjaga kehormatan bangsa di ranah akademik global. Praktik plagiarisme, manipulasi data, dan pelanggaran etika akademik tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mencoreng reputasi institusi dan bangsa. Dengan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan, pendidik turut memperkuat

posisi bangsa dalam percaturan global berbasis pengetahuan dan inovasi.

Pengabdian kepada Masyarakat

Selain pendidikan dan penelitian, pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian integral dari peran pendidik dalam mewujudkan bela negara. Melalui kegiatan pengabdian, pendidik mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial. Program pelatihan, pendampingan UMKM, pe-nyuluhan kesehatan, edukasi lingkungan, serta pem-berdayaan masyarakat merupakan contoh konkret kontribusi pendidik dalam bela negara.

Pengabdian kepada masyarakat juga berperan dalam menjembatani dunia akademik dengan realitas sosial. Kegiatan ini menumbuhkan kepedulian sosial, empati, serta kesadaran bahwa pendidikan memiliki tanggung jawab langsung terhadap pembangunan masyarakat. Dengan demikian, bela negara tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Secara keseluruhan, pendidikan memiliki posisi strategis dalam bela negara karena berperan dalam membentuk generasi yang berpengetahuan, ber-karakter, dan memiliki kesadaran kebangsaan. Melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat, pendidik menjadi aktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan ketahanan bangsa Indonesia.

➤ **Tantangan Implementasi Sikap Bela Negara**

Meskipun dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut muncul seiring dengan dinamika globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan nasional. Kondisi ini menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai kebangsaan sebagai landasan utama.

Menurunnya Nasionalisme dan Identitas Kebangsaan

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, terutama pada generasi muda. Arus informasi dan budaya asing yang melintasi batas negara dengan cepat memengaruhi cara pandang, gaya hidup, dan sistem nilai peserta didik. Budaya global sering kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang lebih modern dan relevan, sehingga nilai-nilai kebangsaan cenderung terpinggirkan.

Pergeseran orientasi nilai ini berdampak pada menurunnya rasa nasionalisme dan kepedulian sosial di lingkungan pendidikan. Peserta didik semakin terbiasa dengan pola hidup individualistis dan materialistis, sementara nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan cinta tanah air semakin jarang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik dalam menanamkan kembali identitas kebangsaan secara kontekstual dan bermakna.

Rahman (2021) mengemukakan bahwa dominasi budaya global dalam kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi pemahaman generasi muda terhadap nasionalisme, terutama ketika nilai-nilai lokal tidak dihadirkan secara relevan dalam proses pendidikan. Oleh

karena itu, pendidik dituntut untuk mampu mengaitkan nilai-nilai kebangsaan dengan realitas kehidupan peserta didik agar tidak dipandang sebagai konsep yang usang atau normatif semata.

Penyebaran Informasi Negatif dan Radikalisme di Lingkungan Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara peserta didik memperoleh dan memproduksi informasi. Kemudahan akses terhadap media digital membuka peluang besar bagi proses pembelajaran, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran informasi negatif. Hoaks, ujaran kebencian, dan konten bermuatan radikalisme dengan mudah beredar dan memengaruhi cara berpikir generasi muda.

Subagyo (2015) dan Zamzamy (2019) menjelaskan bahwa radikalisme di kalangan generasi muda dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemajuan teknologi media, lemahnya literasi digital, serta lingkungan sosial dan pendidikan yang kurang memberikan penguatan nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dituntut untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis dan etika bermedia.

Bagi dunia pendidikan, tantangan ini menegaskan pentingnya peran pendidik sebagai penjaga nilai dan penuntun intelektual. Rendahnya literasi digital dan pemahaman ideologis dapat melemahkan ketahanan intelektual bangsa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendidik dalam menghadapi dinamika digital menjadi bagian penting dari upaya bela negara di bidang pendidikan.

Ketimpangan Kualitas Pendidikan Tinggi

Ketimpangan kualitas pendidikan tinggi masih menjadi persoalan struktural yang memengaruhi efektivitas implementasi bela negara di lingkungan akademik. Perbedaan akses terhadap sumber daya, fasilitas pembelajaran, infrastruktur digital, serta kesempatan pengembangan profesional menyebabkan kualitas pendidikan tidak merata antar wilayah dan antar perguruan tinggi.

Dalam perspektif bela negara, ketimpangan ini berdampak langsung pada ketahanan intelektual dan daya saing bangsa. Perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.

Akibatnya, peran pendidik sebagai agen perubahan dan penggerak nilai kebangsaan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan mutu pendidikan tinggi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pelatihan profesional bagi pendidik, pemerataan infrastruktur digital, serta dukungan terhadap kegiatan akademik yang berorientasi pada kebutuhan nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan tinggi dapat berperan lebih efektif dalam membangun kesadaran bela negara di seluruh wilayah Indonesia.

➤ **Keterkaitan Pendidikan dan Ketahanan Nasional**

Peran pendidikan dalam bela negara memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan upaya memperkuat ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi, pendidikan, serta sosial budaya. Pendidikan berfungsi sebagai sarana strategis dalam membangun daya tangkal bangsa terhadap berbagai pengaruh negatif globalisasi, seperti degradasi moral, disinformasi, dan melemahnya semangat kebangsaan. Melalui proses pendidikan yang

terencana dan berkelanjutan, nilai-nilai kebangsaan dapat ditanamkan secara sistematis kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks ketahanan ideologi, pendidikan berperan dalam memperkuat pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila membantu peserta didik memahami identitas kebangsaan serta menumbuhkan sikap kritis terhadap ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ideologis negara.

Pada aspek sosial budaya, pendidikan berkontribusi dalam melestarikan nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong, toleransi, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam menjaga persatuan dan kohesi nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter dan budaya bangsa akan membentuk individu yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat majemuk.

Tenaga pendidik yang berintegritas dan berjiwa nasionalis memiliki peran sentral dalam proses tersebut. Pendidik tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter kuat, beretika, dan memiliki kesadaran pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui keteladanan dan proses pembelajaran yang bermakna, pendidik menjadi aktor utama dalam membangun generasi yang memiliki komitmen kebangsaan.

Dengan demikian, pendidik dapat dipandang sebagai garda intelektual dalam sistem pertahanan non-militer Indonesia. Peran strategis ini diwujudkan melalui penguatan ilmu pengetahuan, pembentukan moral kebangsaan, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik dan sosial. Ketahanan nasional yang kuat tidak hanya bergantung pada kemampuan pertahanan fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan.

➤ **Implikasi Bela Negara Terhadap Ke-tahanan Nasional Melalui Pendidikan**

Pendidikan sebagai aktor utama dalam proses internalisasi nilai-nilai bela negara memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan ketahanan nasional. Pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai bela negara tidak hanya bertujuan mencetak individu yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk sumber daya manusia yang tangguh, berkarakter, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Melalui pendidikan, nilai-nilai cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan kesetiaan terhadap negara dapat ditanamkan secara berkelanjutan.

Nasution (2019) menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh ketahanan ideologi, sosial, dan budaya. Ketiga aspek tersebut sebagian besar dibentuk melalui proses pendidikan yang sistematis dan terarah. Pendidikan menjadi ruang strategis dalam membangun pola pikir, sikap, dan perilaku warga negara agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kepentingan nasional.

Penguatan nilai bela negara di kalangan pendidik memiliki dampak berantai terhadap peserta didik dan masyarakat luas. Pendidik yang memiliki pemahaman dan komitmen kebangsaan yang kuat akan mampu mentransformasikan nilai tersebut ke dalam proses pembelajaran. Hal ini berimplikasi pada terbentuknya generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme tinggi, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta siap berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Dalam konteks perubahan global yang cepat, peran tenaga pendidik menjadi semakin strategis. Pendidik berfungsi sebagai penjaga keberlanjutan identitas nasional dengan memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap hidup dan relevan di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pembentukan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkomitmen terhadap persatuan dan keberlanjutan bangsa.

BAB 4

TEKNOLOGI DALAM

BELA NEGARA

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep bela negara mengalami transformasi yang signifikan. Jika pada masa lalu bela negara identik dengan pertahanan fisik dan kekuatan militer, maka di era digital bela negara juga menjangkau ruang siber dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah membuka ruang baru bagi ancaman terhadap kedaulatan negara, khususnya dalam bentuk serangan siber, kebocoran data, ketergantungan teknologi asing, serta penyalahgunaan informasi.

Bela negara digital dapat dimaknai sebagai upaya warga negara dalam menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Upaya tersebut meliputi perlindungan data dan informasi

strategis, penguatan keamanan sistem digital, pengembangan teknologi yang mandiri, serta peningkatan kesadaran kolektif terhadap berbagai ancaman siber. Dalam konteks ini, bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam ekosistem digital.

Yunita et al. (2023) menjelaskan bahwa nilai-nilai bela negara seperti cinta tanah air, disiplin, loyalitas, rela berkorban, dan kesadaran berbangsa dapat diterjemahkan ke dalam perilaku dan praktik di dunia digital. Cinta tanah air, misalnya, dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap keamanan data nasional dan perlindungan informasi publik. Disiplin tercermin dalam kepatuhan terhadap standar keamanan dan etika pengembangan teknologi, sementara sikap rela berkorban dapat diwujudkan melalui kesediaan melaporkan kerentanan sistem meskipun tidak selalu memberikan keuntungan finansial secara langsung.

Akbar et al. (2024) dalam kajiannya tentang aktualisasi bela negara melalui literasi digital menegaskan bahwa literasi digital merupakan modal dasar bagi warga negara untuk memahami, mengelola, dan menghadapi tantangan di ruang siber. Tanpa literasi

digital yang memadai, masyarakat akan rentan terhadap disinformasi, kejahatan siber, serta eksploitasi teknologi. Dalam hal ini, pelaku teknologi seperti pengembang perangkat lunak, analis sistem, dan praktisi teknologi informasi memiliki tanggung jawab strategis sebagai agen literasi digital sekaligus penjaga ketahanan sistem. Beberapa dimensi konkret bela negara digital dalam konteks teknologi yang banyak dibahas dalam literatur antara lain sebagai berikut.

➤ **Keamanan Sistem dan Data**

Keamanan sistem dan data merupakan fondasi utama dalam bela negara digital. Pengembangan sistem yang tahan terhadap serangan siber, perlindungan data pribadi dan data strategis negara, serta penerapan standar keamanan yang ketat menjadi bentuk nyata kontribusi di bidang teknologi. Kegagalan dalam menjaga keamanan digital dapat berdampak luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan kepercayaan publik.

➤ **Kemandirian Teknologi**

Kemandirian teknologi menjadi aspek penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk dan sistem asing. Penggunaan serta pengembangan perangkat lunak lokal dan open source merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital. Melalui kemandirian teknologi, bangsa Indonesia memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sistem yang digunakan, sekaligus membuka peluang pengembangan inovasi berbasis kebutuhan nasional.

➤ **Literasi Digital Masyarakat**

Literasi digital masyarakat berperan penting dalam membangun ketahanan nasional di ruang siber. Edukasi publik mengenai etika bermedia, keamanan data, dan risiko digital membantu masyarakat menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, propaganda, maupun manipulasi informasi yang dapat mengancam persatuan bangsa.

➤ Etika Profesi Teknologi

Etika profesi menjadi landasan moral dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Praktisi teknologi dituntut untuk menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan tidak menyalahgunakan akses maupun kewenangan yang dimiliki. Pengembangan fitur dan sistem harus mempertimbangkan dampak sosial serta kepentingan publik, sehingga teknologi tidak menjadi alat yang merugikan masyarakat atau mengancam nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, bela negara digital menjadi jembatan antara nasionalisme modern dan realitas teknologi kontemporer. Melalui penguatan keamanan sistem, kemandirian teknologi, literasi digital, dan etika profesi, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat kemajuan, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa di era digital.

➤ Hubungan Nasionalisme Digital dan Peran *Developer*

Nasionalisme digital merupakan bentuk aktualisasi semangat kebangsaan yang berkembang seiring dengan

kemajuan teknologi informasi. Dalam konteks ini, nasionalisme tidak lagi hanya diekspresikan melalui simbol atau tindakan konvensional, tetapi juga melalui aktivitas, interaksi, dan kontribusi di ruang digital. Pengembang perangkat lunak atau developer memiliki posisi strategis dalam ekosistem ini karena teknologi yang mereka rancang dan kelola turut membentuk ruang digital tempat ekspresi kebangsaan berlangsung.

Developer tidak hanya berfungsi sebagai perancang sistem dan aplikasi, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan teknologi bangsa. Setiap keputusan teknis yang diambil dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari arsitektur sistem, pengelolaan data, hingga pemilihan platform, memiliki implikasi terhadap keamanan, kemandirian, dan kedaulatan digital. Oleh karena itu, peran developer dalam konteks bela negara digital tidak dapat dipisahkan dari nilai nasionalisme digital.

Kurniawaty dan Widayatmo (2022) dalam kajiannya mengenai nasionalisme di era digital menyatakan bahwa generasi muda memiliki kecenderungan mengekspresikan identitas kebangsaan melalui media dan platform digital. Dalam konteks tersebut, developer yang menciptakan dan mengelola platform teknologi

secara tidak langsung menentukan arah dan ruang ekspresi kebangsaan di dunia maya. Platform yang inklusif, aman, dan beretika dapat menjadi sarana penguatan identitas nasional, sementara sistem yang abai terhadap nilai sosial berpotensi menciptakan alienasi dan disintegrasi.

Akbar et al. (2024) menegaskan bahwa developer seharusnya berperan sebagai pelopor literasi digital. Melalui pengembangan sistem yang edukatif dan ramah pengguna, developer dapat membantu masyarakat memahami risiko, tanggung jawab, dan etika dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi arena konsumsi informasi, tetapi juga ruang kebangsaan yang mendukung penguatan nilai-nilai nasional.

Dalam kajian kebijakan teknologi nasional, aktor teknologi informasi dipandang sebagai komponen penting dalam menjaga kedaulatan data dan keamanan infrastruktur kritis negara. Ramadhan (2024) menekankan bahwa pengelolaan sistem informasi strategis membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab terhadap kepentingan nasional. Tanpa dukungan developer yang

berkomitmen terhadap kedaulatan digital, ketahanan nasional di ruang siber akan sulit terwujud.

Dengan demikian, hubungan antara nasionalisme digital dan peran developer bersifat saling terkait. Developer menjadi aktor kunci dalam mewujudkan bela negara digital melalui pengembangan teknologi yang aman, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Peran ini menempatkan developer sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer yang berkontribusi langsung dalam menjaga kedaulatan dan identitas nasional di era digital.

➤ **Pemahaman Bela Negara Digital di Kalangan *Software Developer***

Pemahaman mengenai bela negara dalam konteks digital mengalami perubahan makna yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pada masa sebelumnya, bela negara kerap dipersepsikan sebagai pengorbanan fisik di medan perang. Namun, dalam konteks kontemporer, bela negara juga mencakup bentuk pengabdian non-fisik, terutama melalui keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga keamanan, kemandirian,

dan integritas bangsa di ruang siber (Kementerian Pertahanan RI, 2021).

Bagi software developer, bela negara digital dimaknai sebagai partisipasi dalam melindungi kedaulatan digital Indonesia melalui pengembangan teknologi yang aman, mandiri, dan beretika. Peran ini mencakup tanggung jawab dalam menjaga keamanan data warga negara, membangun sistem yang andal untuk mendukung layanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan platform teknologi lokal. Dengan posisi strategis tersebut, developer berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional di bidang teknologi informasi.

Suryaningtyas (2022) menyatakan bahwa bela negara digital mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat dalam melindungi kepentingan nasional di ranah maya. Kesadaran ini diwujudkan melalui penguatan sistem pertahanan siber, perlindungan data pribadi, serta pengembangan aplikasi dan layanan digital yang mendukung kepentingan publik secara luas. Dalam konteks ini, software developer memiliki peran sentral karena sistem yang mereka kembangkan menjadi infrastruktur utama dalam aktivitas digital masyarakat.

Pemahaman yang utuh terhadap konsep bela negara digital mendorong developer untuk tidak hanya berfokus pada aspek teknis penulisan kode, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, etika, dan kebangsaan dari setiap teknologi yang dikembangkan. Nilai-nilai kebangsaan dapat diinternalisasikan melalui keputusan desain sistem, pemilihan teknologi, serta penerapan standar keamanan dan privasi yang tinggi.

Namun demikian, Putra dan Hartono (2023) menemukan bahwa meskipun sebagian besar developer muda di Indonesia mulai menyadari pentingnya keamanan siber dan perlindungan data, pemahaman terhadap konsep bela negara digital secara menyeluruh masih belum merata. Sebagian developer masih memandang bela negara sebagai tanggung jawab institusi militer semata, bukan sebagai bagian dari peran profesional di bidang teknologi. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang perlu diatasi melalui peningkatan literasi bela negara digital di kalangan profesional teknologi informasi.

Dengan demikian, penguatan pemahaman bela negara digital di kalangan software developer menjadi langkah penting dalam membangun kedaulatan dan ketahanan digital nasional. Melalui peningkatan

kesadaran, pendidikan, dan internalisasi nilai kebangsaan, developer dapat berperan lebih optimal sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer di era digital.

➤ **Wujud Nyata Kontribusi *Software Developer* dalam Bela Negara**

Kontribusi software developer terhadap bela negara dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pengembangan teknologi lokal, penguatan keamanan siber, hingga pemberdayaan dan edukasi digital bagi masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa bela negara di era digital tidak lagi diwujudkan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui kontribusi keahlian dan profesionalisme di bidang teknologi informasi.

Pertama, dalam aspek pengembangan teknologi lokal, software developer Indonesia berkontribusi melalui pengembangan sistem berbasis open source serta aplikasi publik yang mendukung layanan nasional. Contoh nyata dapat ditemukan pada pengembangan berbagai platform pemerintahan digital, seperti PeduliLindungi, Satu Data Indonesia, dan inisiatif GovTech di sektor pendidikan. Upaya tersebut

mencerminkan semangat kemandirian bangsa dalam bidang teknologi, sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional dengan mengurangi ketergantungan pada sistem dan platform asing (Setiadi, 2022).

Kedua, dalam bidang keamanan siber, *software developer* berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem digital, baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta nasional. Indonesia masih menghadapi tingkat ancaman siber yang tinggi, dengan berbagai bentuk serangan yang menargetkan data, infrastruktur, dan layanan publik. Badan Siber dan Sandi Negara mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 400 juta upaya serangan siber terhadap sistem di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, kemampuan teknis dan kesadaran bela negara di kalangan developer menjadi faktor penting dalam memperkuat pertahanan digital bangsa melalui penerapan sistem keamanan yang andal dan berkelanjutan.

Ketiga, kontribusi *software developer* juga diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi digital. Berbagai komunitas developer, seperti ID-Dev, Code for Indonesia, dan Google Developer Group Indonesia, aktif menyelenggarakan pelatihan

pemrograman, literasi keamanan digital, serta program pendampingan bagi pengembang pemula dan startup lokal. Kegiatan ini tidak hanya mendorong pemerataan pengetahuan teknologi, tetapi juga memperkuat ekosistem inovasi dan ekonomi digital nasional (Nasrullah, 2020).

Dengan demikian, kontribusi *software developer* terhadap bela negara diwujudkan melalui keahlian profesional dan tanggung jawab sosial di bidang teknologi. Melalui pengembangan sistem yang mandiri, penguatan keamanan siber, serta pemberdayaan masyarakat digital, *software developer* turut berperan dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kemajuan bangsa di era digital.

➤ Apa itu Keamanan Siber?

Keamanan siber merupakan serangkaian praktik, kebijakan, dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, serta program dari serangan digital, kerusakan, maupun akses yang tidak sah. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks, keamanan siber menjadi elemen penting dalam menjaga keberlangsungan layanan digital dan

melindungi informasi strategis, baik pada tingkat individu, organisasi, maupun negara.

Tujuan utama keamanan siber adalah memastikan terjaganya kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi serta infrastruktur digital. Ketiga prinsip tersebut dikenal sebagai *Confidentiality, Integrity, and Availability* atau *Triad CIA*. Prinsip ini menjadi landasan dalam perancangan dan penerapan sistem keamanan informasi yang efektif.

➤ Tiga Pilar Inti

Keamanan siber berfokus pada pengamanan tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut.

Kerahasiaan

Kerahasiaan bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Perlindungan kerahasiaan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti autentikasi, otorisasi, dan enkripsi data. Upaya ini penting untuk mencegah kebocoran informasi sensitif, termasuk data pribadi, kata sandi, dan informasi strategis yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Integritas

Integritas berfungsi untuk menjamin bahwa data tetap akurat, utuh, dan dapat dipercaya selama proses penyimpanan maupun transmisi. Ancaman terhadap integritas data dapat berupa perubahan, penghapusan, atau manipulasi informasi tanpa izin. Oleh karena itu, sistem keamanan siber harus mampu mendeteksi dan mencegah perubahan data yang tidak sah agar keandalan informasi tetap terjaga.

Ketersediaan

Ketersediaan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem, jaringan, dan data dapat diakses oleh pengguna yang berwenang pada saat dibutuhkan. Gangguan terhadap ketersediaan dapat terjadi akibat kerusakan perangkat keras, kegagalan sistem, maupun serangan siber seperti denial-of-service. Upaya menjaga ketersediaan dilakukan melalui pemeliharaan sistem, pengelolaan infrastruktur yang baik, serta penerapan mekanisme pemulihan apabila terjadi gangguan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip keamanan siber yang komprehensif menjadi bagian penting dalam upaya bela negara di era digital. Keamanan siber tidak hanya berperan dalam melindungi

aset informasi, tetapi juga dalam menjaga kepercayaan publik dan ketahanan nasional di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital.

➤ **Ancaman Terhadap Kedaulatan Digital**

Kedaulatan digital dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu negara untuk mengendalikan data, jaringan, dan infrastruktur teknologi yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam era digital, kedaulatan negara tidak hanya ditentukan oleh penguasaan wilayah fisik, tetapi juga oleh kendali terhadap ruang siber yang menjadi tulang punggung aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.

Berbagai bentuk ancaman siber berpotensi mengganggu kedaulatan digital suatu negara. Ancaman tersebut meliputi spionase siber yang disponsori oleh negara, pelanggaran data dalam skala besar, serta serangan ransomware yang menargetkan layanan publik dan infrastruktur kritis. Serangan siber yang berhasil dapat berdampak luas, seperti melumpuhkan sistem perbankan, mengganggu jaringan listrik, menghambat layanan komunikasi, serta menurunkan kepercayaan

publik terhadap tata kelola pemerintahan dan keamanan nasional.

Dampak ancaman siber tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Gangguan terhadap sistem digital dapat memicu instabilitas ekonomi, kekacauan sosial, dan melemahnya legitimasi negara di mata masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kedaulatan digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kedaulatan nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, peran spesialis keamanan siber menjadi semakin strategis. Mereka berfungsi sebagai penjaga utama ruang digital yang memastikan sistem dan infrastruktur nasional tetap aman dan berfungsi dengan baik. Peran ini menempatkan spesialis keamanan siber sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer yang terlibat langsung dalam tujuan inti bela negara, yaitu menjamin keselamatan dan keber-langsungan kehidupan bangsa. Tanggung jawab mereka tidak lagi terbatas pada aspek teknis, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari upaya pertahanan nasional yang bersifat strategis dan berkelanjutan.

➤ **Melindungi Infrastruktur Nasional Kritis (CNI)**

Perekonomian dan tatanan sosial Indonesia sangat bergantung pada keberlangsungan Infrastruktur Nasional Kritis. Infrastruktur ini mencakup berbagai sektor vital, seperti telekomunikasi, energi, perbankan, transportasi, dan layanan kesehatan. Dalam perkembangannya, sebagian besar sistem pada sektor-sektor tersebut telah terdigitalisasi dan saling terhubung, sehingga meningkatkan efisiensi layanan sekaligus membuka potensi kerentanan terhadap ancaman siber.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem digital menjadikan Infrastruktur Nasional Kritis sebagai sasaran strategis bagi berbagai bentuk serangan siber. Gangguan terhadap salah satu elemen infrastruktur tersebut dapat menimbulkan dampak berantai yang luas. Serangan yang menyebabkan terhentinya jaringan listrik nasional, terganggunya sistem perbankan, atau rusaknya data penting pada layanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai bentuk destabilisasi nasional karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, spesialis keamanan siber memiliki peran yang sangat penting. Mereka bertugas merancang, menerapkan, dan memantau sistem pertahanan digital yang melindungi Infrastruktur Nasional Kritis dari berbagai ancaman. Pengamanan terhadap sistem pengendali industri seperti SCADA pada pembangkit listrik, perlindungan jaringan perbankan nasional, serta menjaga integritas sistem kendali transportasi merupakan bagian dari tanggung jawab utama dalam menjaga keberlanjutan operasional layanan vital negara.

Melalui upaya pengamanan yang berkelanjutan, spesialis keamanan siber berkontribusi langsung dalam memperkuat ketahanan negara terhadap ancaman digital, baik yang berasal dari kejahatan siber maupun aktor asing. Peran ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap Infrastruktur Nasional Kritis merupakan bagian integral dari bela negara di era digital, yang bertujuan memastikan stabilitas, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan bangsa.

➤ **Peran Profesional sebagai Mekanisme Pertahanan Aktif**

Berbagai peran dalam profesi keamanan siber secara langsung diterjemahkan ke dalam tindakan spesifik Bela Negara:

Penanggap Insiden: Penanggap Pertama Digital

Ketika terjadi pelanggaran, Penanggap Insiden berperan sebagai petugas pemadam kebakaran atau paramedis digital. Kontribusi Bela Negara mereka tercermin dalam kecepatan, ketepatan, dan komitmen mereka untuk meminimalkan kerusakan dan memulihkan fungsi. Tugas mereka adalah mengendalikan ancaman, membasmi keberadaan jahat, dan memastikan fungsi-fungsi nasional yang vital kembali berjalan dengan kerugian data atau layanan yang minimal. Pertahanan integritas nasional yang cepat selama krisis ini merupakan pengabdian profesional yang berisiko tinggi.

Arsitek Keamanan: Desain Pertahanan Proaktif

Arsitek Keamanan terlibat dalam Bela Negara melalui visi ke depan. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap ancaman; mereka secara strategis merancang keseluruhan sistem dan arsitektur jaringan agar aman

dan tangguh. Sikap proaktif ini krusial, karena pencegahan jauh lebih murah dan tidak mengganggu daripada pemulihan.

Dengan membangun pertahanan yang mematuhi standar keamanan nasional dan mengantisipasi ancaman di masa mendatang, mereka memastikan pertumbuhan digital bangsa dibangun di atas fondasi keamanan yang teguh.

Peretas Etis dan Penguji Penetrasi: Introspeksi untuk Kekuatan

Peretasan Etis bisa dibilang merupakan salah satu bentuk Bela Negara yang paling proaktif. Dengan mensimulasikan serangan secara legal (uji penetrasi) pada sistem nasional dan pemerintahan, para spesialis ini mengungkap kerentanan sebelum dapat dieksploitasi oleh musuh. Komitmen terhadap peninjauan yang teliti menguji kekuatan digital bangsa dari dalam ke luar merupakan pengabdian profesional yang membangun transparansi dan memperkuat postur pertahanan, yang secara langsung melayani kepentingan nasional.

Bela Negara dalam Kebijakan Digital dan Sumber Daya Manusia

Komitmen terhadap Bela Negara tidak terbatas pada implementasi teknis tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas digital nasional.

➤ Membentuk Kebijakan Siber Nasional

Spesialis keamanan siber berperan sebagai penasihat ahli yang sangat diperlukan bagi pemerintahan tingkat tertinggi. Kontribusi ini merupakan tindakan nyata Bela Negara karena memastikan bahwa respons strategis bangsa terhadap ancaman digital tidak hanya reaktif, tetapi juga handal secara teknologi dan dapat ditegakkan secara hukum.

Peran utama spesialis dalam memberikan konsultasi adalah kepada lembaga-lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lembaga utama yang mengoordinasikan seluruh upaya keamanan siber nasional, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang mengatur ekosistem digital. Spesialis membantu dengan:

- a. Strategi Landasan Realitas: Menerjemahkan tujuan keamanan nasional yang abstrak menjadi persyaratan teknis yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk Strategi Keamanan Siber Nasional. Hal ini mencakup penetapan standar keamanan wajib dan tingkat kematangan bagi lembaga pemerintah dan operator Infrastruktur Nasional Kritis (CNI).
- b. Tinjauan Teknis Legislatif: Memberikan masukan kritis terhadap legislasi untuk memastikan kepraktisan. Misalnya, dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) (UU No. 27 Tahun 2022), para spesialis membantu menentukan langkah-langkah teknis yang diperlukan bagi organisasi untuk melindungi data pribadi, seperti standar enkripsi, kerangka kerja respons insiden, dan mekanisme arus data lintas batas yang aman, sehingga memastikan undang-undang tersebut dapat ditegakkan dan efektif.
- c. Pemodelan Ancaman: Menggunakan data dunia nyata dan intelijen ancaman tingkat lanjut untuk menginformasikan kebijakan, memastikan bahwa sumber daya negara dialokasikan untuk mempertahankan diri terhadap musuh siber yang

paling kuat dan mungkin, sehingga memaksimalkan laba atas investasi keamanan nasional.

Keterlibatan ini memastikan bahwa kerangka hukum dan keamanan Indonesia tetap relevan dan efektif terhadap ancaman global yang berkembang pesat, mengamankan masa depan digital bangsa melalui tata kelola yang terstruktur.

➤ **Membangun Ketahanan Siber dan Meminimalkan Dampak Strategis**

Konsep Bela Negara tidak hanya menuntut pertahanan, tetapi juga kemampuan untuk bertahan dan pulih dari serangan. Ketahanan siber adalah ukuran kapasitas bangsa untuk mempertahankan fungsi-fungsi penting meskipun terjadi serangan siber yang berhasil. Para spesialis berfokus pada:

- a. Perencanaan Kelangsungan Bisnis: Memastikan bahwa sistem CNI dan pemerintah memiliki protokol pencadangan dan pemulihan yang kuat yang dapat meminimalkan waktu henti dari hitungan jam atau hari menjadi hitungan menit.

- b. Redundansi dan Keragaman: Menerapkan beberapa lapisan kontrol keamanan yang beragam sehingga kegagalan satu mekanisme pertahanan tidak menyebabkan kompromi sistem total.
- c. Analisis Pasca-Insiden: Melakukan forensik digital menyeluruh setelah insiden untuk memahami metode musuh dan memperkuat pertahanan di masa mendatang, mengubah setiap serangan menjadi peluang pembelajaran strategis untuk manfaat nasional.

➤ **Kewajiban Etis: Integritas sebagai Patriotisme**

Pada intinya, cerminan Bela Negara dalam keamanan siber terletak pada integritas dan komitmen etis sang spesialis. Seorang profesional keamanan siber memegang kunci atas sejumlah besar data nasional dan pribadi yang sensitif. Godaan untuk melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang teknis sangatlah besar.

- a. Non-Korupsi: Seorang spesialis yang menolak suap atau kesempatan untuk mengeksploitasi kerentanan sistem menunjukkan pengabdian pada prinsip-

prinsip etika yang selaras langsung dengan cita-cita negara yang bersih dan berdaulat.

- b. Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan data nasional dan informasi hak milik secara ketat memastikan bahwa keunggulan kompetitif dan rahasia keamanan bangsa tetap terlindungi.

Dalam konteks ini, integritas profesional identik dengan patriotisme; spesialis etika, menurut definisi, adalah agen negara yang setia, melayani keselamatannya tanpa kompromi pribadi.

➤ **Hambatan dalam Implementasi Bela Negara Teknologi**

Meskipun kontribusi software developer dalam bela negara sangat potensial, berbagai hambatan masih dihadapi dalam implementasinya. Hambatan ini dapat dibagi dalam tiga dimensi utama: edukatif, struktural, dan kultural. Pertama, hambatan edukatif muncul akibat minimnya kurikulum nasional yang mengintegrasikan pendidikan bela negara dengan literasi digital. Rahmawati (2023), sebagian besar pendidikan teknologi informasi di Indonesia masih berfokus pada aspek teknis, dan belum

banyak menekankan tanggung jawab sosial serta etika kebangsaan dalam dunia digital. Akibatnya, banyak developer yang memiliki keahlian teknis, tetapi belum memiliki kesadaran bela negara digital yang mendalam. Kedua, hambatan struktural berkaitan dengan kebijakan dan ekosistem industri. Belum adanya regulasi dan insentif yang memadai bagi pengembang lokal menyebabkan banyak talenta digital Indonesia bekerja untuk perusahaan asing atau proyek komersial luar negeri. Fenomena *brain drain* ini melemahkan kontribusi langsung mereka terhadap kemandirian nasional (Prasetyo & Santoso, 2021). Selain itu, lemahnya perlindungan terhadap produk teknologi lokal dan kurangnya investasi riset menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan peran developer sebagai penjaga kedaulatan digital. Ketiga, hambatan kultural meliputi persepsi sempit mengenai makna bela negara. Di kalangan masyarakat umum, termasuk sebagian developer, istilah bela negara masih sering dikaitkan dengan militerisasi, bukan semangat partisipatif. Padahal, bela negara di era digital menuntut pemahaman baru yang lebih inklusif dan multidimensi (Nasrullah, 2020). Oleh karena itu, diperlukan strategi nasional yang dapat menumbuhkan ekosistem teknologi yang sehat dan

berkarakter kebangsaan, sehingga semangat bela negara dapat diinternalisasi secara lebih luas.

➤ **Dari Bela Negara Konvensional ke Bela Negara Digital**

Bela negara secara konseptual telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Namun, **realitas global saat ini menunjukkan bentuk ancaman yang lebih kompleks.**

Perang modern tidak lagi terbatas pada fisik. Serangan suara kini digantikan dengan *cyber attack*, propaganda, penyalahgunaan data, dan manipulasi algoritma media sosial. Maka, lahirlah istilah baru dalam diskursus nasionalisme **bela negara digital.**

Sebagaimana disampaikan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (2023) :

“Perang masa depan bukan hanya tentang peluru dan tank, tetapi tentang kemampuan bangsa menguasai informasi, siber, dan teknologi.”

Bela negara digital berarti menanamkan kesadaran bahwa setiap produk teknologi lokal yang dikembangkan, setiap inovasi yang memperkuat bangsa, adalah bagian dari pertahanan nasional nonmiliter. Dalam konteks inilah technopreneurship menjadi ladang bela negara yang strategis.

➤ ***Technopreneurship*, Wujud Bela Negara dalam Inovasi**

Technopreneurship adalah bentuk kewirausahaan yang memadukan inovasi teknologi dan semangat nasionalisme ekonomi. Istilah ini berasal dari kata *technology* dan *entrepreneurship*. Seorang technopreneur tidak hanya mencari keuntungan, tetapi menciptakan nilai sosial, ekonomi, dan nasional. Menurut Zimmerer dan Scarborough (2019), technopreneur adalah agen perubahan yang mengubah pengetahuan ilmiah menjadi solusi yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks Indonesia, seorang technopreneur berarti **agen kemandirian bangsa**.

Pilar *Technopreneurship* Nasional

Ada tiga pilar utama yang menjadikan technopreneurship sebagai alat bela negara:

- a. **Kemandirian Teknologi:** Inovasi berbasis sumber daya lokal dan riset nasional.
- b. **Kedaulatan Ekonomi Digital:** Penguatan ekosistem startup yang tidak bergantung pada investor asing.
- c. **Transformasi Sosial:** Membangun kesadaran dan karakter nasionalisme digital pada generasi muda.

Technopreneur sebagai Pejuang Modern

Tokoh dan technopreneur sukses Indonesia seperti **Nadiem Makarim (Gojek)**, **Belva Devara (Ruangguru)**, dan **Gibran Huzaifah (eFishery)** adalah contoh nyata dari penerapan nilai bela negara di dunia teknologi. Mereka tidak berperang dengan senjata, melainkan dengan inovasi dan keberanian membangun solusi lokal yang mendunia.

“Perjuangan kita sekarang bukan merebut kemerdekaan, tetapi mempertahankannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

— *B. J. Habibie.*

➤ Inovasi Digital sebagai Penjaga Kedaulatan

Teknologi digital menjadi tulang punggung semua sektor kehidupan mulai dari pemerintahan, pendidikan, keamanan, hingga ekonomi. Namun, tanpa kemampuan menguasai dan mengelolanya secara mandiri, kedaulatan bangsa menjadi rapuh.

Kedaulatan Digital

Kedaulatan digital (*digital sovereignty*) adalah kemampuan suatu negara untuk mengelola dan melindungi infrastrukturnya secara mandiri dari data center, perangkat lunak, hingga jaringan komunikasi strategis.

Sebagaimana diungkapkan oleh World Economic Forum (2024):

“Negara yang gagal mempertahankan datanya, akan kehilangan kedaulatan dalam mengambil keputusan.”

Di Indonesia, isu kedaulatan digital menjadi sangat relevan dengan munculnya kasus-kasus kebocoran data nasional. Hal ini menuntut partisipasi semua pihak pemerintah, akademisi, industri, dan terutama

technopreneur muda dalam memperkuat sistem keamanan siber nasional.

Sinergi Inovasi

Inovasi technopreneur telah mendukung misi pemerintah melalui berbagai program, antara lain:

- a. **SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)** memperkuat efisiensi dan transparansi birokrasi.
- b. **Gerakan Nasional 1000 Startup Digital** mencetak wirausahawan teknologi nasional.
- c. **Digital Talent Scholarship (Kominfo)** menyiapkan generasi siap bersaing di ranah global.

➤ Studi Kasus *Technopreneur* Bela Negara

Gojek dan Kemandirian Ekonomi Rakyat

Gojek membentuk ekosistem teknologi yang memberdayakan jutaan pekerja di sektor transportasi dan UMKM. Ini merupakan manifestasi ekonomi digital yang memperkuat rakyat kecil dan kemandirian bangsa.

“Kemandirian bukan berarti menutup diri, tetapi berdiri kokoh tanpa tunduk pada ketergantungan.”

— Sri Mulyani Indrawati

eFishery dan Ketahanan Pangan Digital

Startup ini mengembangkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk monitoring tambak ikan secara otomatis. Inovasi lokal ini meningkatkan produksi nasional dan melindungi sektor pangan dari ancaman global.

Ruangguru dan Kedaulatan Pendidikan

Melalui teknologi pembelajaran digital, Ruangguru meningkatkan akses pendidikan nasional. Di tengah gempuran platform asing, inovasi lokal ini menjaga jati diri pendidikan Indonesia dengan kurikulum dan semangat kebangsaan.

➤ Membangun Generasi Digital Patriot

Era digital memerlukan manusia dengan dua kekuatan besar: **kompetensi digital dan kesadaran kebangsaan**. Kedua hal ini menjadi fondasi lahirnya generasi baru yang disebut **“Digital Patriot.”**

Digital patriot adalah technopreneur, pengembang aplikasi, programmer, inovator, dan pemikir digital yang menanamkan nilai bela negara dalam setiap karya teknologinya. Mereka memahami bahwa coding bukan

sekadar menulis algoritma, tetapi menulis masa depan bangsa.

Menurut Kementerian Pertahanan (2023):

“Bela negara di era digital dimulai dari kesadaran menjaga Kolaborasi untuk Kedaulatan Digital Indonesia”.

Kedaulatan digital tidak dapat berdiri hanya oleh satu sektor. Diperlukan sinergi *quadruple helix* antara **pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat.**

a. **Pemerintah**

Menetapkan regulasi yang mendorong penggunaan teknologi lokal dan keamanan informasi strategis.

b. **Akademisi**

Melahirkan riset terapan di bidang perangkat lunak, AI, dan keamanan siber domestik.

c. **Industri**

Membangun ekosistem startup nasional dengan visi nasionalisme ekonomi.

d. **Masyarakat**

Menjadi pengguna yang kritis, sadar data, dan mendukung produk buatan anak negeri.

“Sebesar apa pun inovasi kita, tanpa jiwa kebangsaan, kita hanya sedang membangun bangsa lain.”

— Nadiem A. Makarim

➤ Nasionalisme Digital dan Masa Depan Indonesia

Bela negara adalah semangat, technopreneurship adalah gerakan, dan kedaulatan digital adalah tujuannya. Di era globalisasi yang serba cepat, **nasionalisme baru harus lahir** nasionalisme yang tidak hanya berakar pada sejarah perjuangan, tetapi juga berorientasi pada inovasi masa depan.

Ketika generasi muda menciptakan startup yang memperkuat sektor pertanian, ketika terbangun aplikasi keamanan data nasional, atau ketika anak bangsa menulis baris-baris kode untuk kepentingan rakyat **di situlah bela negara sejati berlangsung.**

“Kemerdekaan tidak ada artinya jika bangsa ini tidak mampu berdiri di atas kemampuan sendiri.”
— B. J. Habibie.

BAB 5

KESEHATAN DALAM BELA NEGARA

Kesehatan merupakan salah satu unsur vital dalam ketahanan nasional. Bangsa yang sehat akan lebih mampu mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan nasional di berbagai sektor. Sebaliknya, rapuhnya kondisi kesehatan masyarakat dapat menjadi titik lemah yang mengancam stabilitas dan keamanan bangsa. Oleh karena itu, peran tenaga medis tidak hanya terbatas pada penyembuhan pasien, melainkan juga menjaga keberlangsungan hidup bangsa dengan meningkatkan kualitas kesehatan public. Pemerintah maksimal melalui telah berupaya pembangunan rumah sakit terintegrasi di beberapa pulau terpencil dengan key point unsur kesehatan TNI diperkuat

oleh peran bintanga teritorial (plus) yang memiliki nilai lebih dalam pemberdayaan Kesehatan (Lardo, 2020).

Selain itu, tenaga medis juga berperan penting dalam menghadapi berbagai krisis kemanusiaan lain, seperti bencana alam, konflik sosial, serta pelayanan di daerah terpencil yang minim fasilitas. Kontribusi tenaga medis dalam kondisi tersebut merupakan bentuk nyata dari implementasi bela negara non-militer. Mereka hadir untuk menjamin hak dasar masyarakat atas kesehatan sekaligus memperkuat aspek ketahanan sosial bangsa. Dedikasi dan profesionalisme tenaga medis dalam melaksanakan tugas kemanusiaan tidak hanya menunjukkan loyalitas terhadap profesi, tetapi juga mencerminkan sikap patriotisme dalam menjaga keutuhan bangsa (Putri, 2020).

Namun demikian, implementasi bela negara pada profesi kesehatan juga menghadapi tantangan yang kompleks. Keterbatasan jumlah tenaga medis, ketimpangan distribusi layanan kesehatan, kurangnya sarana prasarana, serta ancaman globalisasi dalam bidang kesehatan (seperti bioterorisme dan pandemi lintas negara) menjadi faktor yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana tenaga medis di Indonesia dapat

mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam praktik profesionalnya, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi krisis. Tenaga kesehatan yang memiliki wawasan bela negara dengan sikap dan cara pandang bangsa Indonesia dapat merefleksikan pandangan demi terwujudnya kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat dan kesehatan nasional. Nilai-nilai dasar dalam bela negara yang dimiliki oleh tenaga kesehatan sejalan dengan fungsi luhur sebagai tenaga kesehatan yaitu memiliki rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara (Devinda, 2024).

➤ **Kesehatan Pilar Ketahanan**

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor fundamental dalam menentukan kekuatan dan ketahanan suatu bangsa. Masyarakat yang sehat akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi. Kondisi kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk berkontribusi secara optimal dalam berbagai sektor

kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Sebaliknya, lemahnya kondisi kesehatan masyarakat dapat menjadi kerentanan nasional yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial.

Dalam perspektif ketahanan nasional, sektor kesehatan memiliki peran strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya bela negara. Wibowo dan Santosa (2021) menyatakan bahwa ketahanan kesehatan merupakan bagian integral dari ketahanan nasional karena menentukan kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, seperti pandemi, bencana alam, serta ancaman biologis. Krisis kesehatan yang tidak tertangani dengan baik dapat melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi, serta melemahkan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya.

Oleh karena itu, sektor kesehatan dapat dipandang sebagai salah satu garda pertahanan non-militer yang penting bagi kelangsungan bangsa. Tenaga kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, serta kebijakan kesehatan publik memiliki peran langsung dalam menjaga stabilitas nasional. Upaya pencegahan penyakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan

sistem kesehatan nasional merupakan bagian dari kontribusi nyata sektor kesehatan dalam mendukung bela negara dan memperkuat ketahanan nasional.

➤ **Profesi Tenaga Medis dalam Perspektif Bela Negara**

Tenaga medis memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan masyarakat, yang secara langsung berdampak pada keberlangsungan bangsa. Dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, tenaga medis menjadi garda terdepan dalam melawan ancaman kesehatan global. Mereka tidak hanya menjalankan tugas profesional sebagai penyembuh, tetapi juga berkorban demi kepentingan bangsa dan negara (Nugroho, 2020). Dedikasi tenaga medis dalam menghadapi risiko tinggi, termasuk ancaman keselamatan diri, menunjukkan bentuk nyata implementasi bela negara non-militer.

Selain itu, peran tenaga medis tidak hanya terbatas pada kondisi krisis. Dalam kehidupan sehari-hari, tenaga medis turut berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan masyarakat, peningkatan kesadaran kesehatan, serta pemerataan layanan kesehatan di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil.

Hal ini menunjukkan bahwa profesi kesehatan secara konsisten menjadi bagian dari upaya bela negara dalam jangka panjang (Prasetyo, 2022).

➤ **Konsep Bela Negara Non-Militer dalam Profesi Kesehatan**

Bela negara pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada perjuangan fisik melalui militer, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing. Dalam konteks profesi kesehatan, bela negara diwujudkan melalui dedikasi tenaga medis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Putri (2020), profesi kesehatan termasuk dalam kategori profesi strategis non-militer yang kontribusinya sangat menentukan ketahanan bangsa.

Tenaga medis yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab pada dasarnya sedang melaksanakan amanat bela negara. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan unsur vital dalam menciptakan SDM yang produktif dan berdaya saing, sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional. Dengan demikian, profesi tenaga medis dapat diposisikan sebagai

pilar pertahanan non-militer yang mendukung terwujudnya ketahanan nasional secara menyeluruh.

➤ **Implementasi Bela Negara oleh Tenaga Medis**

Bentuk implementasi bela negara yang dilakukan tenaga medis dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

- a. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata peran tenaga medis sebagai garda terdepan bela negara non-militer. Mereka berhadapan langsung dengan risiko penularan, jam kerja yang panjang, serta keterbatasan fasilitas, namun tetap menjalankan tugas demi keselamatan masyarakat. Nugroho (2020) menegaskan bahwa kontribusi tenaga kesehatan dalam pandemi merupakan manifestasi bela negara yang luar biasa, karena menyangkut keselamatan bangsa secara keseluruhan.
- b. Indonesia sebagai negara rawan bencana membutuhkan tenaga medis yang sigap dalam memberikan pelayanan darurat. Kehadiran tenaga medis di daerah terdampak bencana bukan hanya bentuk profesionalisme, melainkan juga wujud nyata bela negara. Mereka memastikan masyarakat

mendapatkan hak kesehatan meski dalam situasi sulit. Hal ini sejalan dengan pandangan Prasetyo (2022) bahwa tenaga medis dalam kondisi darurat bertindak sebagai agen pertahanan sosial yang menjaga stabilitas masyarakat.

- c. Implementasi bela negara juga tampak dalam dedikasi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Keterbatasan sarana dan infrastruktur tidak menyurutkan pengabdian mereka dalam memberikan layanan kesehatan. Kehadiran tenaga medis di wilayah tersebut bukan hanya untuk penyembuhan penyakit, tetapi juga memperkuat eksistensi negara di wilayah yang rentan terhadap pengaruh luar.
- d. Tenaga medis turut berperan dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional dengan cara melakukan pencegahan penyakit, penyuluhan kesehatan, serta upaya promotif dan preventif lainnya. Wibowo & Santosa (2021) menekankan bahwa ketahanan kesehatan adalah bagian integral dari ketahanan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan tenaga medis dalam pembangunan kesehatan masyarakat sama artinya dengan memperkuat pertahanan bangsa dari sisi non-militer.

➤ **Tantangan dalam Implementasi Bela Negara oleh Tenaga Medis**

Meskipun memiliki peran strategis, implementasi bela negara pada profesi kesehatan tidak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, keterbatasan jumlah tenaga medis di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Kedua, distribusi tenaga medis yang tidak merata mengakibatkan adanya kesenjangan pelayanan kesehatan. Ketiga, keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana seringkali menghambat pelayanan maksimal, terutama dalam kondisi krisis.

Selain itu, tenaga medis juga menghadapi risiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan pribadi, seperti terlihat pada tingginya angka tenaga kesehatan yang gugur dalam pandemi COVID-19. Globalisasi juga menghadirkan tantangan baru, misalnya ancaman bioterorisme, pandemi lintas negara, hingga serangan siber pada sistem kesehatan digital. Semua ini menjadi faktor penghambat yang memerlukan perhatian khusus dalam kerangka kebijakan pertahanan non-militer.

➤ **Ketahanan Nasional dan Kesehatan**

Ketahanan nasional merujuk pada kemampuan suatu bangsa untuk bertahan dan pulih dari berbagai tantangan, sehingga menjamin keberlangsungan eksistensi dan kedaulatannya. Kesehatan merupakan komponen mendasar dari ketahanan ini, karena populasi yang sehat sangat penting bagi stabilitas dan pembangunan suatu negara. Soroy Lardo (2020) menekankan adanya sinergi antara Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Pertahanan (Siskeshan), yang menunjukkan keterkaitan keduanya dalam mendukung ketahanan nasional.

➤ **Tenaga Kesehatan sebagai Agen Pertahanan**

Tenaga kesehatan merupakan aktor strategis dalam sistem pertahanan non-militer negara yang secara nyata mewujudkan nilai-nilai Bela Negara. Prinsip-prinsip seperti pengabdian, disiplin, tanggung jawab, dan rela berkorban tercermin dalam komitmen tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa

memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Dalam konteks ini, profesi tenaga kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai penjaga ketahanan bangsa melalui perlindungan kesehatan masyarakat.

Peran tenaga kesehatan melampaui pelayanan klinis semata. Mereka terlibat aktif dalam edukasi kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit, promosi pola hidup sehat, serta respons cepat terhadap kondisi darurat, seperti wabah penyakit, bencana alam, dan krisis kesehatan lainnya. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan pelayanan di daerah terpencil maupun wilayah terdampak bencana, tenaga kesehatan berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata betapa krusialnya peran tenaga kesehatan dalam menjaga ketahanan nasional. Dalam situasi krisis tersebut, tenaga kesehatan berada di garda terdepan dalam penanganan pasien, pengendalian penyebaran penyakit, serta pemulihan sistem kesehatan nasional. Pengorbanan tenaga kesehatan, termasuk risiko terhadap keselamatan diri, menunjukkan bahwa bela negara dapat diwujudkan melalui dedikasi profesional dalam melindungi kehidupan

dan keselamatan bangsa. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat dipandang sebagai agen pertahanan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan nasional melalui pendekatan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.

➤ **Tenaga Kesehatan dan Pertahanan Negara**

Kontribusi Langsung

Tenaga kesehatan memberikan kontribusi langsung terhadap pertahanan negara dengan menyediakan layanan medis esensial, terutama selama keadaan darurat. Keahlian mereka dalam menangani penyakit menular, melakukan vaksinasi, dan memberikan perawatan darurat memastikan kesehatan dan keselamatan penduduk, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional.

Kontribusi Tidak Langsung

Selain perawatan medis langsung, tenaga kesehatan berkontribusi terhadap pertahanan negara melalui promosi inisiatif kesehatan masyarakat, melakukan penelitian, dan berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan. Keterlibatan mereka dalam edukasi kesehatan

dan langkah-langkah pencegahan meningkatkan kapasitas bangsa untuk mencegah dan merespons ancaman kesehatan, sehingga memperkuat ketahanan nasional.

Pertimbangan Etis dan Profesionalisme

Prinsip-prinsip etika yang membimbing tenaga kesehatan seperti benefisensi, non-malefisensi, dan keadilan selaras dengan nilai-nilai Bela Negara. Dedikasi mereka terhadap kesejahteraan pasien, kepatuhan pada standar profesional, serta komitmen untuk terus belajar mencerminkan disiplin dan tanggung jawab yang diharapkan dari warga negara yang membela bangsanya.

➤ Tantangan dan Peluang

Tantangan

Tenaga kesehatan menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, dan paparan terhadap risiko kesehatan. Tantangan-tantangan ini dapat memengaruhi kesejahteraan dan efektivitas mereka, sehingga diperlukan sistem dukungan untuk mempertahankan kontribusi mereka terhadap pertahanan negara.

Peluang

Kemajuan dalam teknologi medis, peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta pengembangan program pelatihan yang lebih baik memberikan peluang untuk memperkuat peran tenaga kesehatan dalam pertahanan negara. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang baru, tenaga kesehatan dapat semakin berkontribusi pada ketahanan dan keamanan bangsa.

BAB 6

SIKAP BELA NEGARA

TENTARA NASIONAL

INDONESIA (TNI)

➤ Hubungan Konsep Bela Negara dengan TNI

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konteks bela negara tidak bisa dilepaskan, karena TNI merupakan komponen utama pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan

melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer (Chalim & Farhan, 2016).

Keterkaitan konsep bela negara dengan TNI dapat dijelaskan sebagai berikut (Nurdin et al., 2024):

A. Dimensi Fisik (Militer)

Dalam konteks fisik, bela negara identik dengan peran TNI yang secara langsung menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi ancaman militer. Misalnya melalui operasi pertahanan wilayah, pengamanan perbatasan, menjaga kedaulatan laut dan udara, serta keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah PBB. Peran ini menunjukkan bahwa TNI adalah garda terdepan dalam aktualisasi bela negara yang bersifat militeristik.

B. Dimensi Non-Fisik (Sosial dan Ideologis)

Bela negara tidak semata mengangkat senjata. TNI juga melaksanakan misi non-fisik, seperti pembinaan teritorial (Binter), program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), serta kegiatan sosial dan edukasi bela negara di sekolah maupun perguruan tinggi. Melalui program tersebut, TNI berperan aktif menanamkan nilai cinta tanah air, gotong royong, dan solidaritas kebangsaan yang sejalan dengan lima nilai dasar bela negara.

C. Kolaborasi dengan Komponen Lain

Konsep Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga melibatkan Polri, ASN, dan seluruh lapisan masyarakat. TNI di sini bertindak sebagai penggerak utama (leading sector) yang membangun sinergi dengan komponen cadangan dan komponen pendukung agar bela negara dapat terlaksana secara menyeluruh.

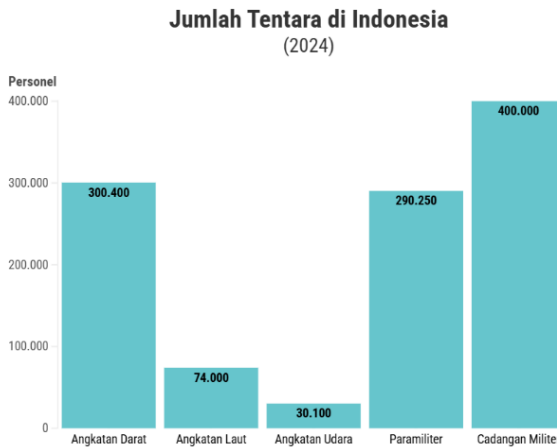
➤ Implementasi Bela Negara dalam Profesi TNI

Dalam pertahanan negara, terdapat dua komponen utama, yaitu komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama memiliki kedudukan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, komponen pendukung berfungsi membantu dan memperkuat tugas komponen utama apabila kondisi mengharuskan keterlibatan lebih luas dari masyarakat, lembaga negara, maupun sektor lain di luar militer (Chalim & Farhan, 2016). Tentara Nasional

Indonesia (TNI) merupakan komponen utama pertahanan negara. TNI berperan sebagai kekuatan inti yang langsung berhadapan dengan ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Tugas pokok TNI meliputi menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa (Nurdin et al., 2024). Dalam menjalankan peran strategis tersebut, TNI terbagi ke dalam tiga matra, yaitu:

- A. TNI Angkatan Darat (AD) → bertugas menjaga pertahanan darat, mengamankan wilayah perbatasan darat, melaksanakan operasi darat dalam menghadapi ancaman separatisme maupun konflik bersenjata, serta melaksanakan pembinaan teritorial melalui pendekatan kepada masyarakat.
- B. TNI Angkatan Laut (AL) → bertanggung jawab menjaga pertahanan maritim, melindungi kedaulatan laut Indonesia, melakukan patroli di perairan strategis, serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut seperti penyelundupan, perompakan, hingga illegal fishing.

- C. TNI Angkatan Udara (AU) → memiliki peran menjaga kedaulatan udara, mengawasi ruang udara nasional, menindak pelanggaran udara, serta mendukung mobilisasi logistik dan pasukan melalui transportasi udara.

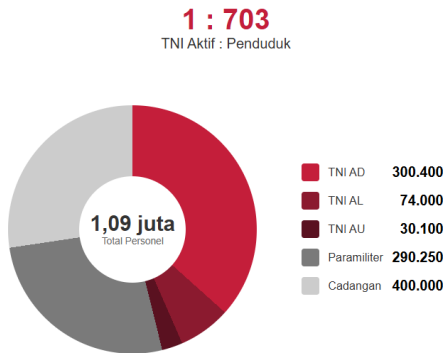


Gambar 1. Jumlah Personil TNI di Indonesia tahun 2024

Dari total kekuatan militer Indonesia pada tahun 2024, mayoritas personel berasal dari TNI Angkatan Darat (AD) sebanyak 300.400 orang, atau sekitar 74,26% dari total personel militer aktif. Dominasi jumlah ini mencerminkan peran strategis Angkatan Darat dalam menjaga wilayah daratan yang luas serta intensitas operasi yang lebih tinggi di wilayah perbatasan dan

daerah rawan konflik. Sementara itu, TNI Angkatan Laut (AL) memiliki 74.000 personel, dan TNI Angkatan Udara (AU) sebanyak 30.100 personel, menunjukkan bahwa kedua matra ini memiliki struktur yang lebih ramping namun tetap krusial dalam menjaga kedaulatan maritim dan udara Indonesia (Suryantoro, 2025).

Selain pasukan reguler, kekuatan militer Indonesia juga diperkuat oleh 290.250 personel para-militer. Mereka berasal dari institusi nonmiliter yang bersenjata dan terlatih, seperti satuan-satuan khusus dari kepolisian atau lembaga lain yang dapat dikerahkan untuk mendukung operasi militer jika diperlukan. Keberadaan mereka menjadi lapisan pendukung strategis dalam menghadapi ancaman non-konvensional dan mendukung stabilitas keamanan dalam negeri. Lebih lanjut, Indonesia memiliki 400.000 personel cadangan militer yang siap dimobilisasi dalam keadaan darurat. Pasukan cadangan ini berfungsi sebagai kekuatan tambahan untuk memperkuat pertahanan negara dalam situasi krisis, bencana, maupun konflik skala besar, serta menjadi wujud partisipasi rakyat dalam sistem pertahanan semesta.



**Gambar 2. Proporsi Personil TNI dan Penduduk
Indonesia**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 284,44 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan total personel militer aktif, paramiliter, dan cadangan yang seluruhnya berjumlah sekitar 1.094.750 personel (terdiri dari 300.400 AD, 74.000 AL, 30.100 AU, 290.250 paramiliter, dan 400.000 cadangan militer), maka proporsinya adalah sekitar 1 personel militer untuk setiap 260 penduduk.

Jika dihitung hanya dari TNI aktif (AD, AL, AU) yang berjumlah total 404.500 personel, maka rasio TNI terhadap penduduk Indonesia adalah sekitar 1 tentara

aktif untuk setiap 703 penduduk. Perhitungan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah militer Indonesia tergolong besar secara absolut, namun secara proporsional terhadap jumlah penduduk, komposisinya masih tergolong moderat, mencerminkan pendekatan pertahanan Indonesia yang lebih berfokus pada sistem pertahanan semesta yaitu kolaborasi antara militer, paramiliter, dan partisipasi rakyat melalui cadangan militer (Suryantoro, 2025).

Sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI dalam menjalankan tugasnya selalu berlandaskan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan kedudukan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara (Chalim & Farhan, 2016).

Berdasarkan regulasi tersebut, fungsi utama TNI dapat dirinci sebagai berikut:

- A. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan bersenjata, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang berpotensi mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.

- B. Penindak terhadap setiap ancaman yang nyata muncul, melalui operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang (OMSP).
- C. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan atau instabilitas.

Implementasi Bela Negara yang dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya terbatas pada fungsi pertahanan militer, melainkan juga mencakup dimensi sosial, pendidikan, hingga teknologi (Chalim & Farhan, 2016). Dengan demikian, TNI berperan penting dalam membangun ketahanan nasional secara menyeluruh dan komprehensif. Wujud nyata implementasi tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek berikut (Nurdin et al., 2024):

a. Pertahanan Militer (*Defence Oriented*)

Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP), seperti pengamanan wilayah perbatasan di Papua (Gambar 2) dan patroli laut di Natuna (Gambar 1) sebagai respons terhadap potensi konflik di Laut Cina Selatan (Haryadi & Ilmi, 2024). Selain

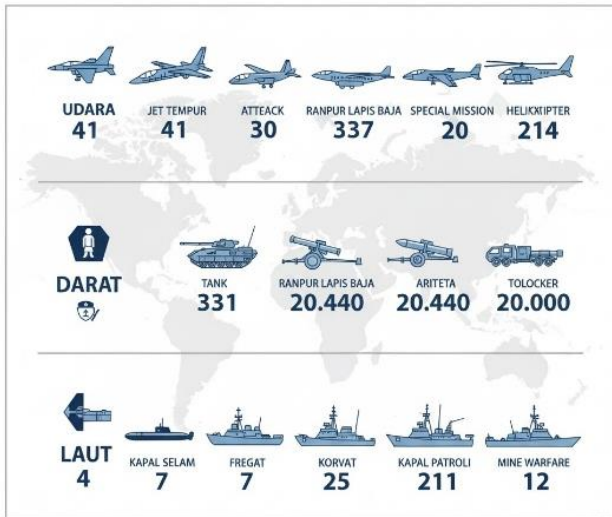
itu, TNI juga melakukan modernisasi alutsista dengan pengadaan kapal selam, pesawat tempur, radar, dan sistem pertahanan udara canggih guna meningkatkan kesiapan tempur. Implementasi ini merepresentasikan Bela Negara dalam bentuk perlindungan langsung terhadap kedaulatan bangsa dan wilayah teritorial Indonesia (Rachmat, 2014).



**Gambar 3. Pengamanan Kemanan Laut Natuna Utara
oleh TNI AL**

Kekuatan personel ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh berbagai alutsista (alat utama sistem senjata) modern yang tersebar di tiga matra: darat, laut, dan udara. Pada matra darat, TNI dilengkapi dengan 331 unit tank tempur, 20.440 kendaraan tempur lapis baja, serta 20.440 unit artileri medan

(self-propelled dan towed). Selain itu, tersedia juga 20.000 kendaraan peluncur roket (rocket launcher) sebagai bagian dari sistem senjata dukungan tempur jarak jauh. Di matra laut, TNI AL diperkuat dengan 4 kapal selam, 7 fregat, 25 korvet, 211 kapal patroli, serta 12 unit mine warfare untuk mendeteksi dan menetralkan ranjau laut. Kekuatan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim, khususnya di wilayah strategis seperti Laut Natuna dan perairan perbatasan lainnya. Sementara pada matra udara, TNI AU memiliki 41 jet tempur, 30 pesawat serang (attack aircraft), 337 kendaraan udara lapis baja (angkut militer), 20 pesawat misi khusus, serta 214 unit helikopter (Suryantoro, 2025). Keberadaan berbagai platform udara ini mendukung pengawasan wilayah udara, mobilisasi pasukan, serta operasi tempur dan non-tempur lainnya secara cepat dan fleksibel.



Gambar 4. Data Pesediaan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata)

b. Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Selain menghadapi ancaman militer, TNI juga menjalankan peran penting dalam berbagai kegiatan non-militer yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Misalnya, misi kemanusiaan dalam penanganan bencana alam seperti gempa Cianjur, tsunami Aceh, erupsi Gunung Merapi, serta evakuasi korban banjir di Kalimantan. TNI juga terlibat dalam bantuan pencarian dan pertolongan (SAR), termasuk

operasi pencarian pesawat jatuh atau kapal tenggelam. Tidak hanya itu, dalam kerangka pengabdian masyarakat, TNI aktif membangun infrastruktur dasar di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) seperti jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan (Posma Sariguna Johnson Kennedy, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Bela Negara tidak hanya sebatas menghadapi ancaman militer, tetapi juga menjaga keselamatan rakyat serta memperkuat solidaritas nasional.



Gambar 5. Aksi Sosial Satgas Pasmar 1 TNI di Gempa Cianjur

c. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)

TNI secara aktif melakukan pembinaan terhadap generasi muda agar memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Melalui pendidikan dan pelatihan, TNI menanamkan nilai patriotisme, semangat kebangsaan, serta pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa. Program seperti Pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) memberikan kesempatan bagi warga sipil untuk memahami dasar-dasar pertahanan negara. Selain itu, TNI bekerja sama dengan sekolah dan universitas dalam kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan, pendidikan Paskibra, seminar kebangsaan, hingga sosialisasi wawasan nusantara. Di sisi lain, TNI juga mengadakan kegiatan terbuka seperti pameran alutsista sebagai sarana edukasi publik. Tidak kalah penting, TNI memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menyebarkan informasi seputar kegiatan Bela Negara, prestasi prajurit, dan program sosial yang melibatkan generasi muda (Nurdin et al., 2024). Strategi ini berperan besar dalam membangun citra positif TNI serta menginternalisasi nilai disiplin, nasionalisme, dan pengorbanan demi bangsa.



Gambar 6. Sosialisasi Bela Negara Oleh TNI AU

➤ **Bela Negara di Era Digital (*Network Centric Warfare dan Cyber Warfare*)**

Dalam menghadapi tantangan global di era digital, TNI mengembangkan strategi pertahanan yang tidak hanya berfokus pada ancaman fisik, tetapi juga ancaman non-fisik di ruang siber. Implementasi ini terlihat dari pembentukan Satuan Siber TNI yang bertugas menjaga keamanan data strategis nasional dari serangan siber internasional. Selain itu, TNI mulai membangun sistem pertahanan berbasis *Network Centric Warfare*, yaitu

pengintegrasian komunikasi, informasi, intelijen, dan komando dalam satu kesatuan jaringan untuk meningkatkan efektivitas operasi militer. Dalam konteks ini, generasi muda juga memiliki peran penting melalui literasi digital, kesadaran terhadap ancaman informasi, serta penerapan etika bermedia. Artinya, Bela Negara saat ini tidak hanya menuntut kesiapan fisik, tetapi juga kecerdasan digital untuk melindungi kedaulatan bangsa dari serangan non-militer.



Gambar 7. Konsep *Network Centric Warfare* (NCW)

Komplek TNI AL mengintegrasikan seluruh elemen Komando, Kendali, Komunikasi Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP) dalam membangun NCW sebagai sebuah konsep modern, menggambarkan kombinasi dari taktik, teknik dan prosedur serta penyebaran informasi secara real time.

➤ **Tantangan Implementasi Bela Negara oleh TNI di Era Modern**

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, TNI menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengimplementasikan konsep Bela Negara. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat militer, tetapi juga merambah ke ranah non-militer, teknologi, dan geopolitik. Berikut beberapa tantangan utama:

a. Ancaman Non-Militer yang Meningkat

Ancaman non-militer kini menjadi salah satu fokus utama dalam pertahanan negara. Serangan siber (cyber attack), penyebaran hoaks, propaganda digital, hingga perang informasi telah menjadi ancaman serius yang dapat melemahkan kedaulatan dan stabilitas nasional. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia mengalami lebih dari 16

juta insiden keamanan siber, termasuk phishing, ransomware, dan serangan RDP (Wicaksono, 2024). Ancaman ini berpotensi melumpuhkan infrastruktur vital, mengganggu sistem pemerintahan, bahkan merusak kepercayaan publik. Selain itu, tantangan lain datang dari terorisme transnasional, radikalisme, narkoba, dan proxy war, yang mengancam persatuan nasional dari dalam negeri (Juniusyani et al., 2025). TNI dituntut untuk meningkatkan kapasitas intelijen dan kolaborasi lintas sektor guna mengantisipasi ancaman hibrida yang bersifat multi-dimensi.

b. Modernisasi Alutsista dan Kemandirian Industri Pertahanan

Salah satu persoalan klasik yang dihadapi TNI adalah keterbatasan alat utama sistem senjata (alutsista). Sebagian besar alutsista TNI, khususnya di matra udara dan laut, masih menggunakan sistem lama berusia puluhan tahun. Sistem pertahanan Indonesia masih menghadapi kendala serius karena keterbatasan alat utama sistem senjata (alutsista) di ketiga matra TNI. Sebagian besar alutsista berusia 25–40 tahun dan meski dirawat secara rutin, kondisi ini jauh dari standar ideal pertahanan modern. Pada

TNI AU, kekuatan udara masih bertumpu pada F-16 A/B buatan AS tahun 1990-an dan sebagian Sukhoi Su-27/30 dari Rusia. Jumlahnya belum memadai untuk mengamankan seluruh wilayah udara Indonesia. TNI AL menghadapi masalah serupa dengan masih mengandalkan kapal perang lama eks Jerman Timur dan Belanda, serta hanya memiliki dua kapal selam aktif. Kondisi ini membuat laut Indonesia rawan pencurian ikan, perompakan, hingga infiltrasi asing. TNI AD pun sebagian besar masih menggunakan alutsista lama era 1940–1980-an, bahkan banyak yang sudah tidak tersedia suku cadangnya. Modernisasi kendaraan tempur, artileri, tank utama, hingga senjata perorangan menjadi kebutuhan mendesak. Kondisi ini membuat Indonesia rawan jika dihadapkan dengan kekuatan militer negara lain yang lebih modern. Dalam konteks ini, modernisasi alutsista menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah telah mendorong pembinaan industri pertahanan dalam negeri melalui PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, namun produksi masih terbatas (Rachmat, 2014). Tantangan berikutnya adalah bagaimana mempercepat transfer teknologi dari negara maju agar Indonesia tidak

hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu memproduksi alutsista strategis secara mandiri.

c. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Profesionalisme Prajurit

Perang modern tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga menuntut penguasaan teknologi canggih seperti drone tempur, artificial intelligence (AI), cyber defense, dan network centric warfare. Oleh karena itu, peningkatan kualitas prajurit TNI menjadi faktor kunci. Pendidikan, pelatihan, serta penguasaan teknologi informasi harus diperkuat agar prajurit mampu beradaptasi dengan karakteristik peperangan generasi kelima (5GW), yang menekankan aspek siber, psikologis, dan informasi (Rachmat, 2014).

d. Kerja Sama Internasional dan Diplomasi Pertahanan

di era globalisasi, TNI tidak dapat berdiri sendiri dalam menjaga kedaulatan. Tantangan keamanan bersifat lintas negara sehingga kerja sama internasional menjadi keharusan. Melalui latihan gabungan dengan negara-negara ASEAN, partisipasi dalam misi perdamaian PBB, serta kolaborasi dengan negara mitra strategis, TNI berupaya meningkatkan kemampuan tempur sekaligus

memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Namun, tantangan muncul dalam menjaga keseimbangan kepentingan nasional di tengah rivalitas geopolitik antara kekuatan besar dunia (F & Hutabarat, 2016).

e. Ancaman Siber dan Perang Generasi Kelima

Salah satu tantangan baru yang dihadapi TNI adalah perang siber. TNI AL melalui konsep Network Centric Warfare (NCW) telah mengembangkan sistem komando dan kontrol berbasis digital untuk menghadapi ancaman ini. Namun, kemampuan tersebut masih perlu diperkuat, terutama dari sisi keamanan jaringan, satelit komunikasi domestik, serta SDM yang menguasai teknologi informasi. Dalam konteks ini, perang siber bukan hanya siber bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan masyarakat, lembaga riset, serta industri teknologi nasional (Wicaksono, 2024).

DAFTAR ISI

Abdillah, F. (2024). Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin*, 13-24.

Asriadi, Menne, F., Setiawan, L., Suriani, S., & Said, M. (2021). Deteksi Kecurangan Laporan Auditor.

Anatansyah Ayomi Anandari, D. A. (2022). Pengelolaan Resimen Mahasiswa Sebagai Warga Terlatih Dan Kesadaran Bela Negara Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 39-46.

Daria, D. (2022). Disharmonisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Mata Kuliah Pancasila Sebagai Mata Kuliah Wajib Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 13-21.

Erva Yunita, I. Y. (2023). Penerapan Nilai Nilai Bela Negara Dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 40-57.

Hasibuan, E. S., Hayati, Y. S., Mirsawati, R., & Umam, K. (2021). Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum.

Malik, A. N., Ferdila, J., Haqni, C. Z., Fadila, I. N., & Putri, A. P. (2024). Implementasi Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 278-291.

Nyoto. (2021). Eksplorasi kinerja dosen melalui tri dharma perguruan tinggi. *Procuratio: jurnal ilmiah manajemen*, 428-438.

Puspitasari, s. (2021). Pentingnya realisasi bela negara terhadap generasi muda sebagai bentuk cinta tanah air. *Indonesian journal of sociology, education, and development*, 72-79.

Rasyid, a. T., ridha, r., hajar, a., armita, s., & saputra, f. T. (2023). Peran dosen dalam pendidikan karakter mahasiswa universitas muhammadiyah bone. *Jurnal ilmiah profesi pendidikan*, 2742-2753.

Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret. *Jurnal Manuhara Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(4), 407. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.726>

Samala, A. D., Rawas, S., Criollo-C, S., Bondarenko, O., Samala, A. G., & Novaliendry, D. (2024). Harmony in Education: An In-Depth Exploration of Indonesian Academic Landscape, Challenges, and Prospects Towards the Golden Generation 2045 Vision. *TEM Journal*, 2436. <https://doi.org/10.18421/tem133-71>

Satresna, d. P. (2023). Politik hukum undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. *Japhtnhan*, 275-290.

Siringoringo, m. P. (2022). Pengaturan dan penerapan jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dalam perspektif uud 1945 sebagai hukum dasar negara. *Jurnal magister hukum program pascasarjana universitas hkbp nommensen*, 112-124.

Suyono, hamidah, l., mufid, a. W., ahmad, a. K., ichwanto, r., fitri, s. G., & putri, n. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi yang terpengaruh globalisasi. *Jurnal penelitian ilmiah multidisipliner*, 1574-1582.

Triana, r., ribowo, s., & rokim, s. (2025). Integrasi tiga pilar: pendidikan, kesehatan, dan keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat desa telukpinang menuju kemandirian dan spiritualitas. *Khidmatul ummah: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1-10.

Usman alhudawi, e. S. (2021). Membangun kesadaran bela negara masyarakat pedesaan berbasis nilai kearifan lokal. *Jurnal muara ilmu sosial, humaniora, dan seni*, 529-538.

BIODATA PENULIS



Syarif Imam Hidayat

Penulis mengajar baik di Program S-1 maupun program Doktor di lingkungan FP UPN Veteran Jawa Timur. Penulis mendapatkan gelar Sarjana (S-1) dari FP UPN Veteran Jawa Timur, Magister Manajemen Agribisnis (MM) dari PPS IPB – Bogor, dan Gelar Doktor Ilmu Pertanian (Sosped) dari PPS Unibraw-Malang. Penulis merupakan Guru Besar Ilmu Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur (2010 - sekarang).



Putu Anggi Suryantari

Penulis lahir di Surabaya pada 4 Februari 2003. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN Klampis Ngasem 1/246, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 19 Surabaya. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis adalah lulusan dari Program Studi Sistem Informasi UPN “Veteran” Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Unit Pendukung Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan UPN “Veteran” Jawa Timur.



Moh Rifqi Zamzami

Penulis mendapatkan Gelar Sarjana di dapat dari UPN Veteran Jawa timur Prodi Sistem Informasi. Penulis Adalah Seorang akademisi dan peneliti yang aktif di bidang teknologi informasi dan sistem analisis. Penulis memiliki beberapa publikasi ilmiah di bidang tersebut. Penulis merupakan Tenaga Pendidik di Bidang Pengelola Teknologi Informasi di Universitas Airlangga Surabaya.



Nur Irvan Rizqi

Penulis merupakan akademisi dan praktisi di bidang Teknologi Informasi. Pendidikan tinggi jenjang sarjana diselesaikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada program studi Sistem Informasi. Penulis menjabat sebagai Kepala Staf Tata Usaha di SMP Bina Bangsa Surabaya serta Dosen Tutor ICT di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA).



M. Nur Hidayatulloh

Penulis adalah lulusan Program Studi D3 Manajemen Informatika Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2008. S1 Sistem Informasi Universitas Narotama Surabaya tahun 2013. Penulis saat ini bekerja sebagai *software developer* di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.



Rangga Laksana Aryananda

Penulis merupakan lulusan dari Program Studi Sains Data UPN “Veteran” Jawa Timur. Saat ini ia berkarier sebagai praktisi di PT. IGS Indonesia Groups, tempat ia terlibat dalam konsultasi IT, pengembangan sistem informasi, pemanfaatan data, serta dukungan penyelenggaraan kegiatan sertifikasi BNSP.